ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

SKRIPSI

Nama : Nia Oktaviani
NIM : 222016204

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Nia Oktaviani
NIM : 222016204

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Oktaviani

NIM : 222016204

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi :Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2020

Nia Oktaviani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
Nama	: Nia Oktaviani
NIM	: 222016204
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Februari 2020

Pembimbing I,

Dr. Sa'adah Siddik, S.E.,M.Si.,AK.CA
NIDN/NBM : 0002095507/972321

Pembimbing II,

Apriahto, S.E.,M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, SE.,M.Si.,AK.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- **Kebanggaan terbesar dalam hidup ini adalah bukan karena tidak pernah gagal, tetapi punya 1000 cara untuk bangkit setiap kali terjatuh.**

- **Hal besar akan datang kepada orang yang sabar.**

(Penulis)

PERSEMBAHAN:

Terucap syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahakan kepada:

- **Bapak dan Mamakku**
- **Kakak dan Adikku**
- **Keluarga Besarku**
- **Pembimbing Skripsiku**
- **Almamaterku**

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Efektiviitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasaan, serta bab simpulan dan saran. Hasil penelitian ini menujukan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dalam 3 tahun, berdasarkan kriteria indikator pada tahun 2017 yang dikategorikan sudah cukup efektif tetapi pada tahun 2016 & 2018 masih dikategorikan tidak efektif.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (Agus Mono dan Erniati) yang telah mendidik, mendoakan, membiayai, menemani dan memberi semangat serta kasih sayang yang begitu besar kepada

penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan terjadi dan terselesaikan tanpa adanya do'anya dan bimbingan dari kedua orang tuaku.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si.,C.A dan Bapak Aprianto S.E.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universias Muhammadiyah Palembang:

1) Bapak Dr. Abid djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati
2) Bapak Drs. Fauzi Ridwan S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3) Bapak Betri S.E.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4) Bapak Betri S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Pembimbing Akademik
5) Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang.
6) Pimpinan, staf, serta karyawan/karyawati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
7) Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelasikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Palembang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

ABSTRACT xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN KEPUSTAKA 8

A. Landasan Teori 8

1. Penerimaan Pajak 8

2. Penagihan Pajak 9

a. Pengertian Penagihan Pajak 10

b. Jangka Waktu Hak Penagihan 11
3. Sistem Pemungutan Pajak 11
4. Hambatan Pemungutan Pajak 13
5. Surat Paksa 13
a. Pengertian Surat Paksa 13
b. Latar Belakang Penerbitan Surat Paksa..... 14
c. Isi dan Karakteristik Surat Paksa..... 15
d. Tata Cara Penyampaian Surat Paksa 15
6. Tunggakan Pajak 16
7. Daluwarsa Pajak..... 18
8. Efektivitas Penagihan Pajak 19
a. Pengertian Efektivitas 19
b. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak..... 20
B. Penelitian Sebelumnya..... 21
BAB III METODE PENELITIAN 28
A. Jenis Penelitian..... 28
B. Lokasi Penelitian 29
C. Operasionalisasi Variabel..... 29
D. Data yang Diperlukan 29
E. Metode Penggumpulan Data..... 30
F. Analisis Data dan Teknik Data 31
1. Analisis Data..... 31
2. Teknik Analisis 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 33

A. Hasil Penelitian 33
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang IB 33
2. Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Palembang IB 35
3. Tugas Kantor KPP Pratama Palembang IB..... 35
4. Fungsi KPP Pratama Palembang IB 36
5. Wajib Pajak..... 36
6. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang IB 37
7. Uraian Tugas dan Wewenang 38
8. Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) 46
B. Pembahasan Hasil Penelitian 47
1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa..... 48
2. Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa..... 49
3. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 59
A. Simpulan 59
B. Saran..... 60
DAFTAR PUSTAKA..... **61**
LAMPIRAN..... **64**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Tindakan Penagihan Pajak Surat Paksa pada KPP Pratama Palembang IB 5

Tabel II.1 Indikator Pengukuran Efektivitas 20

Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 26

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 29

Tabel IV.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 48

Tabel IV.2 Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa 49

Tabel IV.3 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.I Stuktur Organisasi KPP Pratama Palembang IB 37

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....64

Lampiran 2 Fotokopi Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian 65

Lampiran 3 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an 66

Lampiran 4 Fotokopi Sertifikat TOEFL 67

Lampiran 5 Biodata Penulis.....68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Tindakan Penagihan Pajak Surat Paksa pada KPP Pratama Palembang IB 5

Tabel II.1 Indikator Pengukuran Efektivitas 18

Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 24

Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel 27

Tabel IV.1 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 48

Tabel IV.2 Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa 49

Tabel IV.3 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.I Stuktur Organisasi KPP Pratama Palembang IB 36

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi.....64

Lampiran 2 Fotokopi Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian 65

Lampiran 3 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an 66

Lampiran 4 Fotokopi Sertifikat TOEFL 67

Lampiran 5 Biodata Penulis.....68

ABSTRAK

Nia Oktaviani/ 22 2016 204/ 2020/ Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat/ Perpajakan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan penerbitan hingga penagihan surat paksa pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah sesuai dengan Undang- undang tentang prosedur pelaksanaan surat paksa yang dimana salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa, penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2016 dan 2018 dikategorikan tidak efektif dengan persentase 29,5%, 23,8% dan tahun 2017 dikategorikan sudah cukup efektif mencapai 80,7%.

Kata kunci: efektivitas, penagihan pajak, surat paksa

ABSTRACT

Nia Oktaviani / 22 2016 204/2020 / Analysis of the Effectiveness of Tax Arrears Collection with Forced Letters to Increase Tax Receipts at KPP Pratama Palembang Ilir Barat / Taxation

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of collecting tax arrears with forced letters to increase tax revenue at KPP Pratama Palembang Ilir Barat. The method used in this research is descriptive analysis. Data collection methods used in this study are documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive ratio analysis. The results of this study indicate that the procedure for issuing issuance to the collection of forced letters at KPP Pratama Palembang Ilir Barat is in accordance with the Law on the procedure for enforcing forced letters where one of the ways that can be carried out to carry out tax collection is by issuing forced letters, collection of tax arrears by using forced letters in 2016 and 2018, it was categorized ineffective with a percentage of 29.5%, 23.8% and in 2017 it was considered effective enough reaching 80.7%.

Keywords: effectiveness, tax collection, forced letters

PENGESAHAN
NO. 130/Abstract/LB/UMP/II/2020
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Penopang terbesar terhadap penerimaan negara adalah dari sektor perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang berkembang, bisa dilihat dari salah satu kegiatan dari sektor pembangunan nasional. Dana sektor pembangunan nasional tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama kas negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Masyarakat yang mandiri diharapkan mampu mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai

warna negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan negara.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisasi tunggakan pajak dan diharapkan wajib pajak lebih patuh.

Penerimaan pajak merupakan semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak internasional. Pemasukan pajak melalui pajak dikatakan secara optimal memiliki makna bahwa usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2018: 141) menyatakan bahwa penagihan pajak ialah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

Menurut Peraturan Undang-Undang PPSP No. 19 Tahun 2000 pasal 1 menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat

Keputusan Pembentulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setalah surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

Tunggakan pajak ialah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayarkan utang pajaknya. Tunggakan pajak akan timbul apabila adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus.

Menurut Beni (2016: 76) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapai tujuan suatu organisasi. Apabila organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas pemungutan pajak dapat digambarkan dari kemampuan organisasi pemungut pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah yang dilakukan Olvi dan Lintje (2015), Hafifah dan Agista (2018), Nirsetyo, dkk (2018) penelitian ini menganalisa bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak surat paksa dapat dikategorikan tidak efektif dan kontribusinya yang masih sangat kurang, masih banyaknya wajib pajak yang tidak mampu membayar bahkan lalai dalam membayar utang pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2016) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dikategorikan cukup efektif, sedangkan untuk kontribusinya terhadap penerimaan pajak

masih tergolong sangat kurang sehingga banyak diperlukannya perbaikan dalam hal penagihan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyah, dkk (2018) menyatakan bahwa penagihan dengan surat paksa masih dikategorikan kurang efektif, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Derlina (2013) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa masih dikategorikan efektif.

Indonesia menganut sistem *self assesment* yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dan pelanggaran yang akan terjadi dimana sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk di pahami oleh masyarakat, mengakibatkan penerimaan pajak yang kecil, kecurangan yang sering dilakukan wajib pajak yaitu keengganan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent,* yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela.Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu

kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat berlokasi di jalan Tasik, Kambang Iwak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat berintegrasi tinggi dan bekerja secara profesional dan menghimpun penerimaan pajak negara demi terwujudnya kemandirian bangsa. Data penagihan pajak dengan surat paksa

Tabel I.1
Surat Paksa Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat
Tahun 2016-2018

Tahun	Lembar	Target (Rp)	Lembar	Realisasi (Rp)	Tingkat efektivitas (Rp)
2016	4.750	26.646.977.324	1.685	7.873.879.318	29,5%
2017	1.473	7.284.873.113	1.064	5.882.585.855	80,7%
2018	5.232	27.529.483.403	3.132	6.575.951.445	23,8%

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2019

Berdasarkan data Tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penagihan pajak dikaterogikan sudah cukup efektif diatas 80%, namun pada tahun 2018 penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa kembali mengalami peningkatan Rp.27.529.483.403

tetapi tidak diikuti dengan realisasi yang cukup signifikan sebesar Rp.6.575.951.445 yang jauh dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini berbeda dengan teori yang menjelaskan bahwa tingkat efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai tidaknya target yang telah ditentukan.

Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajaknya, masih adanya wajib pajak yang tidak mengakui adanya utang pajaknya, adanya wajib pajak yang melakukan permohonan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa melalui surat paksa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukkan penelitian kembali dengan judul **"Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat" .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharakan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Perpajakan terutama penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat agar dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3. Bagi Almamater

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Palembang dan masyarakat luas pada umumnya, serta menjadi tambahan referensi dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta

Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Taushia

Derlina Sutria T. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba* Vol 1, No, 4. Hal 1520-1531 (online), (https://ejournal.ac.id diakses 20 maret 2019)

Dyah Purba N.A, Syafi'i & Susi Trie W. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. *Equity*, Vol 4 No. 2 hal 51-66 (online), (http://fe.ubhara.ac.id) diakses 1 Desember 2019.

Erly Suandy. 2014. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Erly Suandy. 2016. *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Hafifah N dan Agista A. 2018. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntans* , Vol. 13, No. 2 Hal 129-142 (online), (https://journal.unj.ac.id diakses 28 mei 2019)

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Salemba Empat

Indra Mahardika P. 2019. *Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Quardrant

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (https://kemenkue.go.id diakses 22 November 2019)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang KUP No. 19 tahun 2009. Pasal 20 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (http://www.kemenkue.go.id diakses 29 November 2019)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 pasal 1 angka 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (https://kemenkue.go.id diakses 20 juni 2019)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 pasal 1 angka 3, 4 dan 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. (https://kemenkue.go.id diakses 24 juni 2020)

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Cv.Andi Offset.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan.* Yogyakarta: Cv.Andi Offset.

Monita M.P, Jenny M & Heince R.N Wokas. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal Emba*. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 576-584. (online), (https://ejournal.unsrat.ac.id diakses 18 juni 2019)

Nirsetyo W, Ratna W & Danang. 2018. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika sosial budaya*, Vol. 20, No. 2, Hal 106-119 (online), (http://journals.usm.ac.id diakses 28 mei 2019)

Olvi Madjid, Kalangi L. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Emba* Vol. 3, No. 4 (online), (https://journals.usm.ac.id diakses 20 maret 2019)

Paul F Nalle. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 20, No. 2, (online), (http://ojs.unud.ac.id diakses 19 Maret 2019).

Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 pasal 10 ayat 1 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa. (https://kemenkue.go.id diakses 22 November 2019)

Program Strata 1. 2018. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Usulan Penelitian dan Skripsi*. *Palembang*: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Putri Kurniasari, Suharyono Agus Iwan K. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol 13, No 1, Hal 21-31 (online), (http://journal.feb.unmul.ac.id diakses 18 Maret 2019)

Siti Kurnia R. 2017.*Perpajakan. Konsep dan Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains

Sugiyono. 2017. *Metodelogi Kuantitatif, Kualitatif,* dan R & D. Cetakan Ke 25. Bandung: Alfabeta.

V.Wiratna S. 2018. *Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta: Pustakabarupress